



**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2025 dilaksanakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2025 dapat berjalan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 disusun sebagai bagian awal dari tahapan pembangunan urusan keuangan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun Anggaran 2025 dan memuat Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan adalah agar pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai dengan dokumen yang ada.

C. Objek dan Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Untuk tahun 2025, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan mengusulkan sebanyak 4 (empat) program, 13 Kegiatan dan 62 subkegiatan. Objek monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Objek monitoring dan evaluasi

Meliputi output kegiatan, penganggaran dan waktu pelaksanaan.

2. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilaksanakan per triwulan yaitu, Triwulan I (Januari, Februari, Maret), Triwulan II (April, Mei, Juni), Triwulan III (Juli, Agustus, September) dan TW IV (Oktober, November, Desember)

BAB II

RENCANA AKSI KINERJA

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi yang matang dan terukur. Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan rangkuman program dan kegiatan dalam satu tahun yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja) serta dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA).

Program BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 4 Program dalam menunjang pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mengacu pada misi pertama pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan**. Adapun Tujuan Strategis BPKPAD adalah: **Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja** dengan Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Untuk mewujudkan Capaian Sasaran Strategis diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah didukung oleh 4 Program, 13 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Bupati) Tahun 2025, tersaji pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Bupati) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Penilaian LKD (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	Pada tahun 2025, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Nomor 26.A/LHP.XVIII/PDG/05/2025 dan LHP Nomor 26.B/LHP.XVIII/PDG/05/2025 bertanggal 19 Mei 2025 dan Surat Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor 56/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian tanggal 22 Mei 2025

Gambar 2.1
Pernyataan dan Dokumentasi WTP Tahun 2024



Gambar 2.2



BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi merupakan capaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa tidak semua Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan didukung oleh program-program kerja. Oleh sebab itu, BPKPAD hendaknya merancang atau menyusun anggaran dan program-program kegiatan yang mengacu kepada pemenuhan IKU dan Rencana aksi pada standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berdasarkan Program, kegiatan dan Subkegiatan adalah sebagai berikut :

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tersaji pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						36.907.064.893	16.616.905.163	45,02
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						64.652.100	64.286.230	99,43
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	34	100%	64.652.100	64.286.230	99,43	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.544.619.821	14.476.811.675	41,91
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	55	100%	34.307.369.821	14.239.561.675	41,51	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	100%	237.250.000	237.250.000	100,00	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						27.541.000	27.458.800	99,70
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	100%	27.541.000	27.458.800	99,70	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						418.909.092	373.629.864	89,19

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	100%	52.758.558	45.130.690	85,54
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	20	100%	50.494.201	41.116.186	81,43
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	100%	34.658.900	33.537.980	96,77
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	50	100%	13.600.000	8.600.000	63,24
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	100%	20.090.000	18.992.500	94,54
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1000	100%	234.107.433	213.098.508	91,03
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2200	100%	13.200.000	13.154.000	99,65
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					181.511.000	157.509.000	86,78
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	19	100%	181.511.000	157.509.000	86,78
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					688.164.180	631.612.477	91,78

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	100%	490.992.000	444.032.375	90,44
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	100%	197.172.180	187.580.102	95,14
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					981.667.700	885.597.117	90,21
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	100%	41.701.700	41.309.593	99,06
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	33	100%	170.180.000	152.335.934	89,51
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	120	100%	149.950.000	135.887.150	90,62
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	unit	1	100%	619.836.000	556.064.440	89,71
2			1. Peraturan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					274.536.011.349	258.486.003.755	94,15
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.745.513.158	1.661.738.243	95,20

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen	2	100%	78.506.312	76.514.961	97,46
			2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2024 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen	2	100%	52.833.996	52.470.495	99,31
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	63	100%	35.903.449	35.150.146	97,90
			3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2025 tentang	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	63	100%	38.865.257	38.328.648	98,62

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 15 Oktober 2025								
			4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2025 tanggal 15 Oktober 2025;	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	dokumen	63	100%	123.858.234	123.742.800	99,91
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	63	100%	77.436.990	76.391.703	98,65
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	100%	446.557.636	423.740.980	94,89

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penjabaran APBD							
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	2	100%	562.525.259	550.766.194	97,91
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	2	100%	214.999.892	191.495.516	89,07
				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Dearah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	100	100%	114.026.133	93.136.800	81,68
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					398.650.706	392.697.364	98,51
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	444	100%	59.653.264	58.343.900	97,81
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	658	100%	57.610.698	54.403.764	94,43

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	134	100%	281.386.744	279.949.700	99,49
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					450.201.710	397.870.025	88,38
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.	dokumen	492	100%	139.068.214	129.370.857	93,03
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	dokumen	1	100%	89.980.342	80.742.025	89,73
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	2	100%	100.804.744	99.680.566	98,88

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	5	100%	36.944.430	29.332.361	79,40
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	100%	6.003.432	5.776.466	96,22
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	dokumen	2	100%	45.424.082	40.344.850	88,82
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	100%	31.976.466	12.622.900	39,48
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					271.839.851.448	255.944.093.123	94,15
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	12	100%	259.343.607.316	248.002.012.952	95,63
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	12	100%	9.302.500.053	6.103.007.270	65,61
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	laporan	1	100%	3.193.744.079	1.839.072.901	57,58

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					101.794.327	89.605.000	88,03
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	dokumen	12	100%	101.794.327	89.605.000	88,03
3				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					935.182.462	862.941.866	92,28
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen	1	100%	53.244.190	44.747.800	84,04
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	2	100%	34.843.440	34.603.610	99,31
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen	2	100%	28.988.732	20.891.571	72,07
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan	41	100%	591.452.640	585.033.095	98,91
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan	1	100%	59.445.032	46.631.060	78,44
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	1	100%	6.449.466	3.780.320	58,61
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	dokumen	3	100%	44.594.390	31.715.850	71,12

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Milik Daerah						
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	41	100%	18.908.212	16.958.735	89,69
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	laporan	1	100%	45.105.614	44.772.292	99,26
				Pembinaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	Orang	70	100%	52.150.746	33.807.533	64,83
4				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.526.228.068	1.472.620.767	96,49
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.526.228.068	1.472.620.767	96,49
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	100%	12.138.680	11.779.222	97,04
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	8	100%	65.181.800	61.020.300	93,62
				Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	100%	39.513.400	27.828.993	70,43

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	1	100%	359.790.750	352.788.450	98,05
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	laporan	12	100%	131.667.980	124.531.352	94,58
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	5000	100%	49.070.650	48.843.469	99,54
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	800	100%	30.000.000	29.756.762	99,19
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen	160000	100%	239.629.400	239.331.958	99,88
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dokumen	175000	100%	173.897.600	161.284.431	92,75
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dokumen	50	100%	32.088.348	31.337.150	97,66
				Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	4	100%	161.479.450	156.760.222	97,08

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	4	100%	162.122.300	160.684.450	99,11
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	laporan	4	100%	69.647.710	66.674.008	95,73
TOTAL									313.904.486.772	277.438.471.551	88,38

Data diolah (unaudited)

Sementara itu dari sisi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan dan solusi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PERMASALAHAN

Dalam Pelaksanaan Program/kegiatan/Subkegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tidak ada permasalahan yang berarti. Namun demikian, dari hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

Adapun beberapa subkegiatan yang memiliki serapan anggaran yang rendah, salah satu diantaranya adalah sebagai berikut:

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan persentase realisasi keuangannya sebesar 41,51%, sub kegiatan ini merupakan dana earmark yang terdiri dari Gaji ASN Lingkup BPKPAD dan TPP, Gaji PPPK sebanyak 426 orang dengan sumber dana DAU PPPK . Sesuai ketentuan Pasal 23 Permendagri No 6 Tahun 2021 tentang Gaji PPPK bahwa gaji PPPK dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Pencairan Gaji PPPK Formasi 2025 yang diangkat di Tahun 2025 baru mulai dibayarkan pada bulan September 2025 sehingga untuk Gaji P3K terealisasi selama 4 bulan

2. SOLUSI

Beberapa Solusi yang di sarankan sebagai tindak lanjut dari Permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan/seluruh Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan rencana kerja dapat segera diatasi.
2. Seluruh Kepala Bidang dan Kasubid agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan PD pengampu terkait jadwal penyaluran dana earmark.

BAB IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pedoman dalam mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2025. Evaluasi ini disusun tetap berpedoman pada Rencana aksi dan monitoring selama tahun berjalan, laporan ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan penyelenggaraan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang- undangan yang berlaku, semoga hasil evaluasi yang ditetapkan ini dapat terus ditingkatkan sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama.

Raihian, 5 Januari 2026
Kepala BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan


SUHANDRI, SE.MM
NIP. 19700608 200212 1 003